KOMISI XI
Keuangan dan Moneter,
Perencanaan Pembangunan Nasional,
Sektor Jasa Keuangan

Analisis Strategis terhadap Isu Aktual
INFO Singkat
VOL. XVII, NO. 10/II/PUSAKA/MEI/2025

DIPLOMASI EKONOMI DAN KEMITRAAN STRATEGIS: UPAYA INDONESIA MENGHADAPI PERANG DAGANG GLOBAL

Ariesy Tri Mauleny*

Abstrak

Kebijakan tarif resiprokal agresif AS memicu perubahan tatanan global, diawali dengan deglobalisasi dan penguatan proteksionisme. Kondisi ini berpotensi menghambat kinerja ekspor dan investasi asing, mengganggu rantai pasok, volatilitas harga komoditas, serta menekan nilai tukar dan suku bunga. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi dampak kebijakan proteksionisme global terhadap ekonomi Indonesia dan menganalisis strategi diplomasi ekonomi dalam kerangka kemitraan strategis internasional. AS yang selama ini menjadi pendukung multilateralisme, mulai menjadikan unilateralisme sebagai rule of the game. Globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan. Indonesia perlu memperluas penetrasi ekspor ke kawasan strategis dan secara simultan meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi melalui penguatan kemitraan global yang terukur dan adaptif. Komisi XI DPR perlu mendorong pemerintah untuk memanfaatkan potensi kemitraan ekonomi strategis, guna memperluas jaringan perdagangan dan investasi internasional, disamping tetap menjaga ketahanan ekonomi domestik dan daya saing. Pendekatan komprehensif terintegrasi menjadi kunci dalam menghadapi perang dagang global yang kompleks dan multisektor.

Pendahuluan

Pengumuman kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) memicu ketidakpastian, penurunan prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, tekanan harga komoditas, hingga instabilitas pasar keuangan global. Meski ketegangan sedikit mereda pascapenundaan selama 90 hari dan kesepakatan AS-China, namun potensi ketidakpastian ekonomi global masih tinggi sehingga dampaknya ke ekonomi domestik tetap perlu diwaspadai (Kemenkeu, 2025).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa dinamika kebijakan tarif resiprokal AS bersamaan dengan retaliasi China akan menyebabkan ketidakpastian yang memicu peningkatan fragmentasi ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia (Bank Indonesia, 2025). Sementara Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Edhi Purnawan, mengatakan ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan volatilitas pasar keuangan melemahkan rupiah, mengancam ekspor, dan menekan daya beli masyarakat (Grehenson, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. *Email: ariesy.mauleny@dpr.go.id*

Ketidakpastian global harus diwaspadai. Sinergitas kebijakan fiskal, moneter, makro, dan mikroprudensial, yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan inklusif, harus didukung oleh diplomasi ekonomi dan diversifikasi kemitraan strategis internasional (O'Brien & Williams, 2010). Artikel ini bertujuan mengidentifikasi dampak kebijakan proteksionisme global terhadap ekonomi Indonesia dan menganalisis strategi diplomasi ekonomi dalam kerangka kemitraan strategis internasional.

Dampak Perang Dagang Global

Kebijakan tarif retaliasi AS ke berbagai negara memberikan signifikansi dampak yang berbeda-beda (Gambar 1). Bagi Indonesia, dampak langsung kebijakan tarif AS relatif terbatas. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa *share* ekspor AS pada PDB Indonesia sebesar USD29,5 miliar (2,1% PDB). Kondisi tersebut masih harus diwaspadai, mengingat tantangan domestik yang *looming* di tengah dinamika ketidakpastian global yang semakin kompleks (Kemenkeu, 2025).

Tarif Retaliasi AS - ke Berbagai Negara.		Ekspor ke AS (USD bio)	Ekspor ke AS (% of GDP)
Cambodia	49	13,4	31,7*
Vietnam	46	142,5	29,9
Thailand	36	66,0	12,5
China	34	462,6	2,5
Indonesia	32	29,5	2,1
South Africa	30	14,9	3,7
India	26	91,2	2,5
South Korea	25	135,5	7,2
Japan	24	152,1	3,8
Malaysia	20	53,8	12,7
Germany	20	163,5	3,5
Italy	20	78,4	3,3
France	20	61,2	2,0*
Philippines	17	14,6	3,2
Australia	10	17,1	1,0
Brazil	10	44,2	2,0
Mexico	10	510,0	27,5
UK	10	69,3	1,9
Canada	10	422,2	18,8
Turkey	10	17,8	1,4
Saudi Arabia	10	13,2	1,2
Singapore	10	43,6	8,0

Sumber: Kemenkeu, 2025.

Gambar 1. Dampak Tarif Retaliasi AS ke Berbagai Negara

Perang dagang AS-China telah menciptakan ketegangan ekonomi global sejak tahun 2018. Nilai ekspor Indonesia ke China turun 2,6% pada tahun 2019 menjadi USD25,85 miliar. Sementara ekspor Indonesia ke AS naik 4,5% menjadi USD18,64 miliar, efek dari substitusi produk China yang dikenai tarif di AS. Pada sisi investasi, 33 perusahaan besar merelokasi basis produksi dari China ke ASEAN, dimana tujuh perusahaan memilih Indonesia. Namun, ketegangan juga menyebabkan penurunan harga komoditas global, yang berpotensi menurunkan pendapatan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor ekonomi Indonesia tahun 2019 (5,02%) lebih lambat dibandingkan tahun 2018 (5,17%) (Kemhan, 2025).

Perang dagang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Potensi dampak positif akan muncul ketika negara mampu merespons dengan strategi yang tepat. Misalnya, mengurangi ketergantungan ekspor dan mendiversifikasi ke pasar non-tradisional yang potensial, hilirisasi industri, memperkuat ekonomi domestik dengan industri padat karya dan bernilai tambah tinggi, hingga mendorong BUMN/BUMD lebih berperan. Namun, secara keseluruhan, perang dagang menciptakan gangguan rantai pasok global yang menjadi fondasi bagi globalisasi ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Volatilitas dan ketidakpastian global juga berpotensi melemahkan kegiatan ekspor dan impor serta dapat mendorong aliran modal keluar (*capital outflow*). Hal ini akan mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, hingga menyebabkan suku bunga global tetap tinggi, yang tentu saja dapat mengganggu sistem keuangan dan perekonomian nasional.

The New Economic Order

Setelah perang dunia, banyak negara bersepakat untuk membuat "*global rule base*" yang memungkinkan hubungan antarnegara berdasarkan suatu aturan dan kepastian. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, telah terbentuk berbagai lembaga multilateral seperti United Nations (UN), World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank (WB), yang bertujuan menjaga hubungan antarnegara berdasarkan kepastian aturan bersama yang disepakati (Haspramudilla, 2025).

Namun, AS yang selama ini menjadi pendukung multilateralisme, mulai menjadikan unilateralisme sebagai *rule of the game (the new economic order)*. Globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan. Proteksionisme dan orientasi "*inward looking*" serta prinsip "*my country first*" telah mengubah tatanan global. Perubahan ini sangat memengaruhi sistem perdagangan global dimana blok kesepakatan perdagangan dan investasi yang dibangun antarnegara ditinggalkan dan tidak lagi dihormati (Kemenkeu, 2025).

Proses ini kemudian berlanjut dengan kesepakatan dagang AS-Inggris, diikuti dengan negosiasi AS-China yang menghasilkan jeda tarif sementara. Berbagai negara pun merespons kebijakan tarif resiprokal tersebut dengan pendekatan yang beragam. Dinamika proses negosiasi dalam konteks diplomasi ekonomi ini menggambarkan dunia masih akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan, perang dagang, hingga gangguan sistem ekonomi dan keuangan global. Di sisi lain, perang militer belum berakhir (Israel-Palestina dan India-Pakistan). Hal ini tentu menambah kewaspadaan, di tengah perang dagang yang eskalatif. Ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global, juga menandakan perekonomian dunia yang semakin rapuh.

Strategi Diplomasi Ekonomi dan Kemitraan Strategis

Perluasan penetrasi ekspor produk unggulan ke kawasan potensial seperti ASEAN+3, BRICS, dan Eropa, disertai penguatan diplomasi ekonomi dan perluasan kemitraan

strategis, akan menjadi langkah penting dalam menghadapi ketidakpastian akibat perang dagang global. Dengan kinerja ekonomi regional yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan sebagai peluang untuk diversifikasi mitra dagang, industri, dan ekspor. ASEAN+3 misalnya, dapat menjadi representasi wilayah yang mampu meredakan ketegangan dan menciptakan lebih banyak kepastian terhadap dinamika global. Hal tersebut disampaikan perwakilan peemrintah ketika bertemu dengan Presiden Asian Development Bank (ADB), Masato Kanda, yang bersepakat memperkuat kemitraan dan menjadi katalis yang menghubungkan Indonesia dengan pasar yang lebih luas.

Indonesia dan Inggris juga telah menyepakati untuk memperkuat kemitraan di bidang ekonomi strategis dengan membentuk Indonesia-UK Economic Growth Partnership (EGP). Kemitraan ini akan mendorong pertumbuhan dan kolaborasi kedua negara di berbagai sektor melalui integrasi ekonomi yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. (Wahyu, 2025).

Indonesia telah menjajaki peluang meningkatkan perdagangan bersama Asean Korea Center (AKC) dan Korean Importers Association (Koima) dan membangun kemitraan strategis sektor mineral dan energi guna mendorong hilirisasi komoditas bersama India. Saat ini, Indonesia juga akan memfinalisasi kemitraan strategis dengan Australia yang merupakan sinergi antara program transformasi Astacita dengan strategi ekonomi Australia di Asia Tenggara. Melalui Danantara, Indonesia membangun kemitraan strategis dengan Milltec Investment, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi asing, termasuk kegiatan audit untuk memastikan efisiensi bagi kepentingan umum.

Artinya, perang dagang bukan sekadar konflik tarif, tetapi merupakan bagian dari kompetisi strategis global yang mencakup dimensi ekonomi, teknologi, dan geopolitik. Indonesia harus mampu membaca dinamika tersebut secara cermat dan memanfaatkannya secara strategis demi kepentingan nasional. Di sisi lain, Indonesia perlu mempertahankan posisi nonblok sambil membangun kemitraan strategis melalui diplomasi proaktif, termasuk dengan Amerika Serikat dan negara-negara mitra dagang utama lainnya. Diplomasi ekonomi untuk mencari penyelesaian terbaik harus tetap berpegang pada prinsip kemandirian ekonomi dan kedaulatan bangsa.

Kemenkeu sebagai mitra kerja Komisi XI memainkan peran penting dalam merespons perang dagang global. Terutama dalam hal menjaga stabilitas ekonomi nasional, menjaga kepercayaan pasar, hingga melindungi masyarakat dari dampak negatif. Peran ini mencakup pengelolaan APBN yang *prudent*, kebijakan fiskal yang berdampak, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk memperluas, membangun, dan menjaga kemitraan strategis di sektor ekonomi dan keuangan bersama dengan menteri keuangan dari banyak negara lainnya. Disamping terus menjajaki peluang pasar internasional baru berdasarkan kedekatan yang digali dalam berbagai organisasi internasional.

Penutup

Kebijakan agresif tarif resiprokal AS memicu perubahan tatanan global, yang diawali dengan globalisasi dan proteksionisme yang menguat. Kondisi ini berpotensi memperlemah kinerja ekspor, perlambatan investasi asing, gangguan pada rantai pasok, volatilitas harga komoditas, serta nilai tukar dan suku bunga yang tertekan. Untuk menghadapi ketidakpastian global akibat perang dagang ini, Indonesia perlu memperluas penetrasi ekspor ke kawasan strategis dan secara simultan meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi melalui penguatan kemitraan global yang terukur dan adaptif.

DPR melalui Komisi XI, mendorong pemerintah untuk terus memanfaatkan potensi kemitraan ekonomi strategis, guna memperluas jaringan perdagangan dan investasi internasional. Disamping menjaga perekonomian domestik tetap tumbuh. Pendekatan komprehensif terintegrasi ini menjadi kunci dalam diplomasi ekonomi untuk menghadapi perang dagang global yang bersifat kompleks dan multisektor. Indonesia juga perlu memperkuat kapasitas diplomasi ekonominya melalui kerja sama ekonomi dan keuangan yang berkualitas, perwakilan dagang yang kompeten, riset pasar berbasis data, serta diplomasi lintas-sektor antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri.

Referensi

- Grehenson, Gusti. (2025, April 29). Liputan: hadapi ketidakpastian Ekonomi Global, Ekonom UGM Desak Pemerintah dan BI Bersinergi Jaga Stabilitas Ekonomi. *Ugm.ac.id*. https://ugm.ac.id/id/berita/hadapi-ketidakpastian-global-ekonom-ugm-desak-pemerintah-dan-bi-bersinergi-jaga-stabilitas-ekonomi/
- aspramudilla, Dara. (2025, April 16). "The New Economic Order": babak baru ekonomi global, perang tarif dan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia. Mediakeuangan.kemenkeu.go.id. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/the-new-economic-order-babak-baru-ekonomi-global-perang-tarif-dan-implikasinya-terhadap-ekonomi-indonesia
- Kementerian Keuangan. (2025, Mei 20). Pengantar dan keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. *Pidato Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI*. Sistem Informasi Persidangan Paripurna (SIPERDANA) s.id/RapurKE-18.
- Kementerian Pertahanan. (2025, April 16). Perang dagang AS-Tiongkok: dampak, peluang, tantangan, dan Solusi strategis bagi Indonesia. *Kemhan.go.id*. https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html
- Robert O'Brien & Marc Williams. (2010). *Global Political Economy: Evoolution and Dynamics*. Third Edition. Palgrave Macmillan. p.217.

© 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.